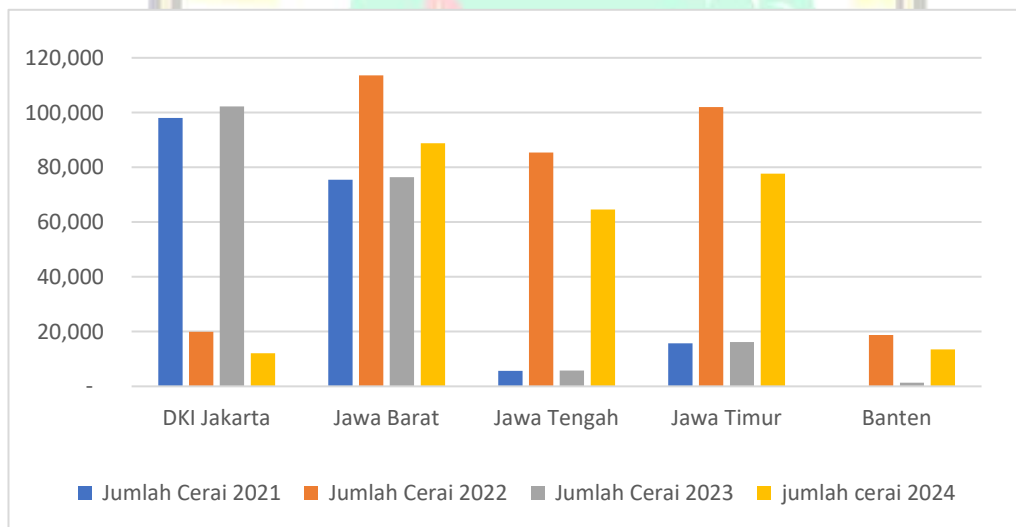


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian secara nasional mencapai 259.872 kasus pada tahun 2023, meningkat dari 237.891 kasus pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perceraian telah menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian kebijakan. Tingginya angka perceraian ini mencerminkan adanya tekanan multidimensional yang dialami rumah tangga di Indonesia, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis, sehingga memerlukan perhatian khusus dari akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas.



Gambar 4.1 cerai menurut provinsi di Indonesia 2021-2024

Sumber : BPS

Gambar 4.1 memperlihatkan perkembangan jumlah perceraian menurut provinsi di Indonesia pada periode 2021–2024. Secara umum, tren perceraian di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dengan konsentrasi kasus yang cukup tinggi di provinsi-provinsi berpenduduk besar di Pulau Jawa.

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Jawa Barat

mencatat sebanyak 88.842 kasus perceraian, menjadikannya provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap angka perceraian nasional. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan jauh melampaui provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan jauh melampaui provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tingginya angka perceraian tersebut mencerminkan kompleksitas dinamika rumah tangga di Jawa Barat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, tingkat urbanisasi yang tinggi, serta pergeseran nilai-nilai sosial dalam institusi pernikahan.

Tingginya angka perceraian ini tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas sosial yang berkembang di Jawa Barat. Wilayah ini mengalami urbanisasi yang sangat pesat, terutama di kawasan penyangga ibu kota seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya. Urbanisasi ini membawa perubahan struktur sosial dan pola hidup, yang berpengaruh pada nilai-nilai keluarga, peran gender, serta ekspektasi dalam pernikahan. Selain itu, mobilitas penduduk yang tinggi akibat migrasi kerja maupun pendidikan menciptakan pola relasi yang lebih cair dan longgar, menggeser ikatan kekeluargaan yang sebelumnya kuat.

Kultur masyarakat Jawa Barat juga memiliki dinamika tersendiri. Di satu sisi, masyarakat Sunda dikenal menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan harmoni sosial, namun di sisi lain modernisasi cepat yang tidak diimbangi dengan penguatan struktur sosial tradisional dapat menimbulkan ketegangan dalam relasi rumah tangga. Perubahan pola relasi antargenerasi, tuntutan ekonomi keluarga, serta keterbatasan akses terhadap layanan konseling dan mediasi pernikahan turut memperbesar risiko konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Dengan kata lain, Jawa Barat bukan hanya mencerminkan angka perceraian tinggi secara statistik, tetapi juga merepresentasikan titik temu antara tradisi dan modernitas, serta ketegangan antara nilai kolektif dan individualisme baru, yang menjadikannya wilayah penting untuk dikaji dalam penelitian mengenai perceraian di Indonesia

Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai, tetapi juga oleh anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat luas. Berbagai studi

menunjukkan bahwa anak dari keluarga bercerai lebih rentan mengalami masalah psikologis, penurunan prestasi akademik, hingga perilaku menyimpang. Secara ekonomi, perceraian dapat menyebabkan kerentanan ekonomi pada rumah tangga perempuan, terutama jika perempuan menjadi kepala keluarga tunggal tanpa sumber penghasilan tetap. Di tingkat masyarakat, tingginya angka perceraian dapat mengganggu tatanan sosial, menurunkan kohesi komunitas, serta menambah beban layanan sosial pemerintah.

Penelitian oleh Herawati dan Haryanto (2019) menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga pasca perceraian menghadapi kesulitan ekonomi lebih besar karena terbatasnya akses pekerjaan layak, rendahnya penguasaan keterampilan, serta beban pengasuhan anak yang tidak proporsional. Studi ini juga mencatat bahwa sebagian besar keluarga pascaperceraian di Indonesia mengalami penurunan kualitas hidup, terutama dalam aspek kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan anak. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mendorong perceraian merupakan langkah penting dalam merancang intervensi sosial yang tepat dan preventif.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai apa saja faktor yang secara signifikan mendorong tingginya angka perceraian. Selama ini, studi tentang perceraian di Indonesia banyak menekankan pada aspek demografis dan ekonomi, namun belum banyak yang mengintegrasikan pendekatan teoritis dan empiris secara komprehensif. Dalam konteks ini, teori Ekonomi Keluarga Gary Becker (1973), Family Stress Model oleh Conger et al. (1999), dan pendekatan psikososial Erikson (1950) menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana tekanan ekonomi, kondisi kesehatan, dan usia saat pernikahan pertama dapat berpengaruh terhadap ketahanan rumah tangga.

Selain itu, penting pula mempertimbangkan aspek lingkungan sosial. Dalam masyarakat dengan tingkat perceraian tinggi, individu cenderung lebih permisif terhadap perceraian karena terpapar norma sosial yang berubah sebuah proses yang dijelaskan dalam teori *social contagion*. Artinya, perceraian dapat menyebar secara sosial melalui pengaruh lingkungan sekitar.

Di sisi lain, masih terbatas studi yang menggunakan pendekatan data mikro dengan variabel objektif dari data resmi pemerintah untuk menganalisis faktor-faktor perceraian. Misalnya, penggunaan data Susenas dengan indikator seperti kepemilikan BPJS PBI sebagai proksi kemiskinan masih sangat jarang ditemukan dalam literatur akademik di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan penelitian (research gap) yang ingin dijawab melalui studi ini.

Kemiskinan dalam penelitian ini diukur secara objektif, tidak hanya berdasarkan penghasilan, melainkan melalui sejumlah indikator rumah tangga seperti kepemilikan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), luas lantai rumah, Menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa kajian ketimpangan spasial, rumah dengan luas lantai $\leq 8 \text{ m}^2$ per orang sering dijadikan salah satu tanda kemiskinan ekstrem. Dalam konteks ini, rumah tangga dengan luas lantai kecil cenderung memiliki akses terbatas terhadap fasilitas hidup yang layak, sanitasi, dan privasi, yang berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan psikologis dalam keluarga.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara empiris pengaruh lingkungan sosial, kemiskinan, kesehatan, dan usia pernikahan pertama terhadap perceraian, dengan menggunakan data Susenas 2022 di Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik mengenai determinan perceraian serta menjadi masukan kebijakan untuk intervensi sosial yang lebih tepat sasaran

1.2 Masalah Penelitian

Bagaimana pengaruh lingkungan sosial, kemiskinan, kesehatan, dan usia pernikahan pertama terhadap kemungkinan perceraian di Jawa Barat?"

1.3 Tujuan Penelitian

Menguji pengaruh variabel sosial dan ekonomi terhadap perceraian di Jawa Barat menggunakan data mikro Susenas 2022

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian ekonomi keluarga dan kesejahteraan rumah tangga, khususnya dalam menjelaskan bagaimana faktor lingkungan sosial, kemiskinan, gangguan kesehatan, dan usia menikah pertama berperan dalam pengambilan keputusan perceraian. Selain itu, penelitian ini memperluas pendekatan interdisipliner dalam bidang ekonomi pembangunan, dengan mengaitkan dinamika sosial, ekonomi, dan demografi rumah tangga terhadap stabilitas institusi keluarga di Indonesia.

2. Manfaat Praktis/Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat, dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tingginya angka perceraian. Dengan memahami kontribusi faktor lingkungan sosial, kemiskinan, gangguan kesehatan, dan usia menikah pertama terhadap perceraian, pemerintah dapat merancang program intervensi sosial dan ekonomi seperti edukasi pranikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan jejaring sosial di lingkungan rentan perceraian, serta perluasan cakupan jaminan sosial bagi kelompok rentan.

Selain itu, penelitian ini penting untuk menegaskan bahwa tingginya angka perceraian bukan sekadar persoalan sosial, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketimpangan ekonomi, kesejahteraan anak, produktivitas tenaga kerja, serta beban fiskal negara. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendukung perumusan strategi pembangunan manusia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi di daerah berpenduduk besar seperti Provinsi Jawa Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN : Bab pertama berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang diangkat, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab kedua berisi mengenai rancangan dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dari berbagai sumber literatur seperti jurnal-jurnal penelitian, buku-buku pendukung, dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, kerangka pemikiran yang

digunakan peneliti, dan hipotesis yang sesuai terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN : Penelitian ini menggunakan data cross section yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 Provinsi Jawa Barat

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekonometrika dengan menggunakan regresi logistik. Regresi logistik merupakan model ekonometrika yang bersifat khusus dimana variabel terikatnya berupa data kategorik (biner), dalam hal ini adalah cerai hidup (1) dan lainnya (0).

